



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
13. Peraturan Bupati....

f

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

9. Desa Mandiri.....

9. Desa Mandiri, adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
10. Desa Maju, adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Berkembang, adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Tertinggal, adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Desa Sangat Tertinggal, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional;
- b. alokasi afirmasi.....

- b. alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebesar Rp672.421.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Alokasi afirmasi untuk daerah sebesar Rp3.169.320.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan.....

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Boyolali
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Boyolali
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Boyolali
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Boyolali
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Boyolali

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus): dan

c. tahap III.....

f

- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 - (6) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

(3) Prioritas.....

- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 11

- (1) Bidang Pembangunan Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, yang meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi; dan
 - 4) informatika dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) kesehatan masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

1) kesiapsiagaan.....

f

- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 - 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 12

Peningkatan pelayanan publik tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang diwujudkan dengan peningkatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting), meliputi :

- a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 13

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), meliputi:

- a. produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b. Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- c. pembangunan embung Desa; dan
- d. sarana olahraga Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang dalam implementasinya dapat dijadikan sebagai salah satu unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki Desa.

Pasal 14

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting.

(2) Kegiatan.....

↓

- (2) Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 15

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) pengadaan.....

- 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri, meliputi :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di desa setempat;
- c. pengembangan ketahanan keluarga;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

f. dukungan.....

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan ekonomi produktif yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- k. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
- l. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan
- m. kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 17

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3) pembentukan.....

- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) penguatan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2) perluasan.....

- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - 2) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - 4) pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 - 5) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi:
- 1) penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 - 2) pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 - 3) pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 - 4) penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan

5) penguatan.....

5) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 18

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III.....

- c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
 - (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
 - (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa.....

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(1) Bupati.....

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal *19 Desember* 2018

a BUPATI BOYOLALI, *f*
[Signature]
= *f*
† SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal *14 Desember* 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Inspektur Daerah,

[Signature]
MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR *86*
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

[Signature]
AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina
NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 85 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
 BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA KECAMATAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	DANA DESA YANG DITERIMA (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	SELO				9,245,200,000
1	Tlogolele	672,421,000	0	204,492,000	876,913,000
2	Klakah	672,421,000	0	292,288,000	964,709,000
3	Jrakah	672,421,000	0	540,608,000	1,213,029,000
4	Lencoh	672,421,000	0	284,444,000	956,865,000
5	Suroteleng	672,421,000	0	147,578,000	819,999,000
6	Samiran	672,421,000	0	210,153,000	882,574,000
7	Selo	672,421,000	0	273,556,000	945,977,000
8	Tarubatang	672,421,000	0	175,001,000	847,422,000
9	Senden	672,421,000	0	201,432,000	873,853,000
10	Jeruk	672,421,000	0	191,438,000	863,859,000
II	AMPEL				8,546,573,000
11	Tanduk	672,421,000	0	153,410,000	825,831,000
12	Banyuanyar	672,421,000	0	117,109,000	789,530,000
13	Sidomulyo	672,421,000	0	154,010,000	826,431,000
14	Ngargosari	672,421,000	0	125,782,000	798,203,000
15	Selodoko	672,421,000	211,288,000	204,806,000	1,088,515,000
16	Ngenden	672,421,000	0	120,709,000	793,130,000
17	Ngampon	672,421,000	0	133,854,000	806,275,000
18	Gondangslamet	672,421,000	0	172,979,000	845,400,000
19	Candi	672,421,000	0	247,684,000	920,105,000
20	Urutsewu	672,421,000	0	180,732,000	853,153,000
III	CEPOGO				13,763,885,000
21	Wonodoyo	672,421,000	0	173,733,000	846,154,000
22	Jombang	672,421,000	0	169,531,000	841,952,000
23	Gedangan	672,421,000	211,288,000	220,268,000	1,103,977,000
24	Sumbung	672,421,000	0	174,591,000	847,012,000
25	Paras	672,421,000	0	66,461,000	738,882,000
26	Jelok	672,421,000	0	273,990,000	946,411,000
27	Bakulan	672,421,000	0	107,654,000	780,075,000
28	Candigatak	672,421,000	0	145,462,000	817,883,000
29	Cabeankunti	672,421,000	0	288,121,000	960,542,000
30	Mliwis	672,421,000	0	322,455,000	994,876,000
31	Sukabumi	672,421,000	0	165,863,000	838,284,000
32	Genting	672,421,000	211,288,000	178,603,000	1,062,312,000
33	Cepogo	672,421,000	0	433,765,000	1,106,186,000
34	Kembangkuning	672,421,000	0	337,481,000	1,009,902,000
35	Gubug	672,421,000	0	197,016,000	869,437,000
IV	MUSUK				8,134,522,000
36	Pagerjurang	672,421,000	0	72,982,000	745,403,000
37	Sukorejo	672,421,000	0	190,614,000	863,035,000
38	Sruni	672,421,000	0	201,539,000	873,960,000
39	Cluntang	672,421,000	0	140,477,000	812,898,000

1	2	3	4	5	6
40	Kembanghari	672,421,000	0	119,449,000	791,870,000
41	Ringinlarik	672,421,000	0	150,329,000	822,750,000
42	Kebongulo	672,421,000	0	76,201,000	748,622,000
43	Musuk	672,421,000	0	209,502,000	881,923,000
44	Sukorame	672,421,000	0	148,367,000	820,788,000
45	Pusporenggo	672,421,000	0	100,852,000	773,273,000
V	BOYOLALI				4,901,777,000
46	Karanggeneng	672,421,000	0	117,964,000	790,385,000
47	Winong	672,421,000	0	157,885,000	830,306,000
48	Penggung	672,421,000	0	240,710,000	913,131,000
49	Kiringan	672,421,000	0	144,957,000	817,378,000
50	Mudal	672,421,000	0	126,364,000	798,785,000
51	Kebonbimo	672,421,000	0	79,371,000	751,792,000
VI	MOJOSONGO				8,612,931,000
52	Madu	672,421,000	0	76,341,000	748,762,000
53	Singosari	672,421,000	0	123,189,000	795,610,000
54	Tambak	672,421,000	0	149,962,000	822,383,000
55	Manggis	672,421,000	0	102,655,000	775,076,000
56	Jurug	672,421,000	0	110,993,000	783,414,000
57	Karangnongko	672,421,000	0	118,428,000	790,849,000
58	Butuh	672,421,000	0	55,675,000	728,096,000
59	Kragilan	672,421,000	0	125,013,000	797,434,000
60	Brajan	672,421,000	0	91,856,000	764,277,000
61	Metuk	672,421,000	0	148,053,000	820,474,000
62	Dlingo	672,421,000	0	114,135,000	786,556,000
VII	TERAS				9,909,353,000
63	Kopen	672,421,000	0	85,152,000	757,573,000
64	Doplang	672,421,000	0	88,526,000	760,947,000
65	Kadireso	672,421,000	0	80,086,000	752,507,000
66	Nepen	672,421,000	0	58,787,000	731,208,000
67	Sudimoro	672,421,000	0	55,955,000	728,629,000
68	Bangsalan	672,421,000	0	76,105,000	748,526,000
69	Salakan	672,421,000	0	103,577,000	775,998,000
70	Teras	672,421,000	0	107,473,000	779,894,000
71	Randusari	672,421,000	0	93,352,000	765,773,000
72	Mojolegi	672,421,000	0	81,947,000	754,368,000
73	Gumukrejo	672,421,000	0	96,506,000	768,927,000
74	Tawang Sari	672,421,000	0	105,538,000	777,959,000
75	Krasak	672,421,000	0	134,623,000	807,044,000
VIII	SAWIT				8,904,378,000
76	Kateguhan	672,421,000	0	63,465,000	735,886,000
77	Manjung	672,421,000	0	72,165,000	744,586,000
78	Gombang	672,421,000	0	64,969,000	737,390,000
79	Tegalrejo	672,421,000	0	68,808,000	741,229,000
80	Tlawong	672,421,000	0	72,522,000	744,943,000
81	Jenengan	672,421,000	0	80,923,000	753,344,000
82	Cepokosawit	672,421,000	0	72,107,000	744,528,000
83	Kemasan	672,421,000	0	76,301,000	748,722,000
84	Jatirejo	672,421,000	0	78,064,000	750,485,000
85	Bendosari	672,421,000	0	59,826,000	732,247,000
86	Karangduren	672,421,000	0	54,013,000	726,434,000
87	Guwokajen	672,421,000	0	72,163,000	744,584,000
IX	BANYUDONO				11,288,320,000
88	Dukuh	672,421,000	0	135,130,000	807,551,000
89	Jipangan	672,421,000	0	84,155,000	756,576,000
90	Jembungan	672,421,000	0	85,378,000	757,799,000
91	Sambon	672,421,000	0	96,221,000	768,642,000
92	Kuwiran	672,421,000	0	61,858,000	734,279,000

1	2	3	4	5	6
93	Cangkringan	672,421,000	0	72,210,000	744,631,000
94	Ngaru-aruru	672,421,000	0	80,881,000	753,302,000
95	Bendan	672,421,000	0	69,713,000	742,134,000
96	Ketaon	672,421,000	0	74,632,000	747,053,000
97	Banyudono	672,421,000	0	71,005,000	743,426,000
98	Batan	672,421,000	0	60,666,000	733,087,000
99	Denggungan	672,421,000	0	82,953,000	755,374,000
100	Bangak	672,421,000	0	74,676,000	747,097,000
101	Trayu	672,421,000	0	66,176,000	738,597,000
102	Tanjungsari	672,421,000	0	86,351,000	758,772,000
X	SAMBI				12,834,956,000
103	Canden	672,421,000	0	216,424,000	888,845,000
104	Senting	672,421,000	0	112,950,000	785,371,000
105	Tempursari	672,421,000	0	192,918,000	865,339,000
106	Jatisari	672,421,000	0	99,032,000	771,453,000
107	Glintang	672,421,000	0	110,194,000	782,615,000
108	Catur	672,421,000	0	78,476,000	750,897,000
109	Tawengan	672,421,000	0	112,963,000	785,384,000
110	Sambi	672,421,000	0	110,912,000	783,333,000
111	Demangan	672,421,000	0	119,930,000	792,351,000
112	Kepoh	672,421,000	0	115,089,000	787,510,000
113	Jagoan	672,421,000	0	151,384,000	823,805,000
114	Babadan	672,421,000	0	112,926,000	785,347,000
115	Ngaglik	672,421,000	0	166,131,000	838,552,000
116	Trosobo	672,421,000	0	173,308,000	845,729,000
117	Cermo	672,421,000	0	117,749,000	790,170,000
118	Nglembu	672,421,000	0	85,834,000	758,255,000
XI	NGEMPLAK				9,935,448,000
119	Ngargorejo	672,421,000	0	149,424,000	821,845,000
120	Sobokerto	672,421,000	0	286,918,000	959,339,000
121	Ngesrep	672,421,000	0	110,504,000	782,925,000
122	Gagaksipat	672,421,000	0	117,946,000	790,367,000
123	Donohudan	672,421,000	0	113,606,000	786,027,000
124	Sawahan	672,421,000	0	184,249,000	856,670,000
125	Pandeyan	672,421,000	0	115,763,000	788,184,000
126	Kismoyoso	672,421,000	0	137,984,000	810,405,000
127	Dibal	672,421,000	0	139,165,000	811,586,000
128	Sindon	672,421,000	0	132,617,000	805,038,000
129	Manggung	672,421,000	0	192,848,000	865,269,000
130	Giriroto	672,421,000	0	185,372,000	857,793,000
XII	NOGOSARI				11,072,332,000
131	Kenteng	672,421,000	0	145,803,000	818,224,000
132	Potronayan	672,421,000	0	196,019,000	868,440,000
133	Sembungan	672,421,000	0	187,903,000	860,324,000
134	Jeron	672,421,000	0	175,585,000	848,006,000
135	Ketitang	672,421,000	0	201,867,000	874,288,000
136	Rembun	672,421,000	0	128,693,000	801,114,000
137	Guli	672,421,000	0	161,965,000	834,386,000
138	Tegalgi	672,421,000	0	162,182,000	834,603,000
139	Bendo	672,421,000	0	159,896,000	832,317,000
140	Keyongan	672,421,000	0	238,874,000	911,295,000
141	Pojok	672,421,000	0	148,870,000	821,291,000
142	Glonggong	672,421,000	0	186,843,000	859,264,000
143	Pulutan	672,421,000	0	236,359,000	908,780,000
XIII	SIMO				10,943,410,000
144	Pelem	672,421,000	0	118,889,000	791,310,000
145	Bendungan	672,421,000	0	119,539,000	791,960,000
146	Temon	672,421,000	0	118,854,000	791,275,000

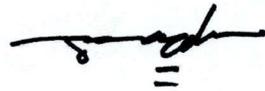
1	2	3	4	5	6
147	Teter	672,421,000	0	95,695,000	768,116,000
148	Simo	672,421,000	0	141,866,000	814,287,000
149	Walen	672,421,000	0	115,971,000	788,392,000
150	Pentur	672,421,000	0	185,990,000	858,411,000
151	Gunung	672,421,000	0	208,127,000	880,548,000
152	Talakbroto	672,421,000	0	107,504,000	779,925,000
153	Kedunglengkong	672,421,000	0	203,902,000	876,323,000
154	Blagung	672,421,000	0	306,991,000	979,412,000
155	Sumber	672,421,000	0	291,045,000	963,466,000
156	Wates	672,421,000	0	187,564,000	859,985,000
XIV	KARANGGEDE				13,007,648,000
157	Manyaran	672,421,000	0	225,115,000	897,536,000
158	Sempulur	672,421,000	0	91,169,000	763,590,000
159	Klumpit	672,421,000	0	94,465,000	766,886,000
160	Pinggir	672,421,000	0	101,814,000	774,235,000
161	Bantengan	672,421,000	0	160,160,000	832,581,000
162	Tegalsari	672,421,000	0	112,996,000	785,417,000
163	Sranten	672,421,000	0	83,437,000	755,858,000
164	Grogolan	672,421,000	0	104,301,000	776,722,000
165	Mojosari	672,421,000	0	64,864,000	737,285,000
166	Pengkol	672,421,000	0	163,644,000	836,065,000
167	Karangkepoh	672,421,000	0	105,697,000	778,118,000
168	Sendang	672,421,000	0	141,272,000	813,693,000
169	Kebonan	672,421,000	0	98,080,000	770,501,000
170	Klari	672,421,000	0	130,823,000	803,244,000
171	Bangkok	672,421,000	211,288,000	218,939,000	1,102,648,000
172	Dologan	672,421,000	0	140,848,000	813,269,000
XV	KLEGO				10,979,444,000
173	Kalangan	672,421,000	0	202,570,000	874,991,000
174	Sendangrejo	672,421,000	0	262,978,000	935,399,000
175	Tanjung	672,421,000	0	191,838,000	864,259,000
176	Jaten	672,421,000	0	109,006,000	781,427,000
177	Blumbang	672,421,000	0	100,775,000	773,196,000
178	Sangge	672,421,000	0	203,190,000	875,611,000
179	Banyuurip	672,421,000	0	141,765,000	814,186,000
180	Bade	672,421,000	0	153,429,000	825,850,000
181	Klego	672,421,000	0	162,584,000	835,005,000
182	Gondanglegi	672,421,000	0	200,210,000	872,631,000
183	Karanggatak	672,421,000	0	119,672,000	792,093,000
184	Sumberagung	672,421,000	0	238,066,000	910,487,000
185	Karangmojo	672,421,000	0	151,888,000	824,309,000
XVI	ANDONG				13,344,865,000
186	Pakel	672,421,000	0	143,983,000	816,404,000
187	Gondangrawe	672,421,000	0	161,994,000	834,415,000
188	Sempu	672,421,000	0	346,753,000	1,019,174,000
189	Beji	672,421,000	0	202,235,000	874,656,000
190	Mojo	672,421,000	0	184,292,000	856,713,000
191	Senggrong	672,421,000	0	158,278,000	830,699,000
192	Kedungdowo	672,421,000	0	160,090,000	832,511,000
193	Kacangan	672,421,000	0	97,178,000	769,599,000
194	Andong	672,421,000	0	150,519,000	822,940,000
195	Munggur	672,421,000	0	94,978,000	767,399,000
196	Pakang	672,421,000	0	109,514,000	781,935,000
197	Pranggong	672,421,000	0	108,816,000	781,237,000
198	Kunti	672,421,000	0	115,264,000	787,685,000
199	Pelemrejo	672,421,000	0	115,391,000	787,812,000
200	Semawung	672,421,000	0	140,530,000	812,951,000
201	Kadipaten	672,421,000	0	296,314,000	968,735,000

1	2	3	4	5	6
XVII	KEMUSU				9,608,797,000
202	Watugede	672,421,000	211,288,000	225,812,000	1,109,521,000
203	Kedungrejo	672,421,000	0	129,479,000	801,900,000
204	Sarimulyo	672,421,000	0	109,019,000	781,440,000
205	Klewor	672,421,000	0	101,507,000	773,928,000
206	Bawu	672,421,000	0	229,294,000	901,715,000
207	Kendel	672,421,000	211,288,000	444,538,000	1,328,247,000
208	KemusU	672,421,000	211,288,000	224,619,000	1,108,328,000
209	Genengsari	672,421,000	0	173,958,000	846,379,000
210	Kedungmulyo	672,421,000	211,288,000	210,390,000	1,094,099,000
211	Wonoharjo	672,421,000	0	190,819,000	863,240,000
XVIII	WONOSEGORO				10,045,414,000
212	Karangjati	672,421,000	211,288,000	345,090,000	1,228,799,000
213	Ketoyan	672,421,000	0	139,023,000	811,444,000
214	Bolo	672,421,000	0	145,492,000	817,913,000
215	Banyusri	672,421,000	0	168,728,000	841,149,000
216	Gosono	672,421,000	211,288,000	194,969,000	1,078,678,000
217	Wonosegoro	672,421,000	0	138,606,000	811,027,000
218	Bandung	672,421,000	0	147,298,000	819,719,000
219	Bojong	672,421,000	0	226,624,000	899,045,000
220	Kauman	672,421,000	0	203,408,000	875,829,000
221	Lemahireng	672,421,000	0	117,885,000	790,306,000
222	Guwo	672,421,000	211,288,000	187,796,000	1,071,505,000
XIX	JUWANGI				7,682,137,000
223	Krobokan	672,421,000	0	205,881,000	878,302,000
224	Ngaren	672,421,000	0	123,433,000	795,854,000
225	Kalimati	672,421,000	211,288,000	201,733,000	1,085,442,000
226	Kayen	672,421,000	0	154,355,000	826,776,000
227	Jerukan	672,421,000	0	136,014,000	808,435,000
228	Pilangrejo	672,421,000	0	187,147,000	859,568,000
229	Cerme	672,421,000	0	95,259,000	767,680,000
230	Juwangi	672,421,000	0	136,185,000	808,606,000
231	Ngleses	672,421,000	0	179,053,000	851,474,000
XXX	GLADAGSARI				10,029,774,000
232	Seboto	672,421,000	0	272,219,000	944,640,000
233	Kaligentong	672,421,000	0	226,450,000	898,871,000
234	Gladagsari	672,421,000	0	126,107,000	798,528,000
235	Kembang	672,421,000	0	302,502,000	974,923,000
236	Ngagrong	672,421,000	0	342,109,000	1,014,530,000
237	Candisari	672,421,000	0	203,346,000	875,767,000
238	Ngargoloka	672,421,000	0	245,068,000	917,489,000
239	Sampetan	672,421,000	211,288,000	571,518,000	1,455,227,000
240	Ngadirojo	672,421,000	0	339,753,000	1,012,174,000
241	Jlarem	672,421,000	211,288,000	253,916,000	1,137,625,000
XXI	TAMANSARI				8,069,889,000
242	Lampar	672,421,000	0	172,623,000	845,044,000
243	Dragan	672,421,000	0	127,994,000	800,415,000
244	Karanganyar	672,421,000	0	130,535,000	802,956,000
245	Jemowo	672,421,000	0	184,900,000	857,321,000
246	Sumur	672,421,000	0	97,214,000	769,635,000
247	Sangup	672,421,000	0	165,092,000	837,513,000
248	Mriyan	672,421,000	0	127,387,000	799,808,000
249	Lanjaran	672,421,000	0	104,587,000	777,008,000
250	Karangkendal	672,421,000	0	113,268,000	785,689,000
251	Keposong	672,421,000	0	122,079,000	794,500,000
XXII	WONOSAMODRO				8,941,032,000
252	Ngablak	672,421,000	0	133,492,000	805,913,000
253	Kedungpilang	672,421,000	0	114,826,000	787,247,000

f

1	2	3	4	5	6
254	Kalinanas	672,421,000	0	196,835,000	869,256,000
255	Gilirejo	672,421,000	0	157,305,000	829,726,000
256	Jatilawang	672,421,000	0	177,675,000	850,096,000
257	Garangan	672,421,000	0	194,911,000	867,332,000
258	Bercak	672,421,000	0	129,984,000	802,405,000
259	Bengle	672,421,000	0	305,240,000	977,661,000
260	Gunungsari	672,421,000	211,288,000	294,038,000	1,177,747,000
261	Repaking	672,421,000	0	301,228,000	973,649,000
	JUMLAH				219,802,085,000

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

